

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH BERSUBSIDI DALAM RANGKA
PEMENUHAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PADANG**

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANISA SALSABILA

2210112087

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing:

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum

Titin Fatimah, S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg: 09/PK-VII/2026

	No. Alumni Universitas	Anisa Salsabila		No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Solok/ 06 Juni 2004	f. Tanggal Lulus	:25 Februari 2026
b. Nama Orangtua	: Indra Beni Yola Syofianita	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian	
c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 3 Tahun 6 Bulan	
d. PK	: Hukum Administrasi Negara	i. IPK	: 3,97	
e. No BP	: 2210112087	j. Alamat	: Kampai Tabu Karambia, Lubuk Sikarah, Kota Solok	

PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH BERSUBSIDI DALAM RANGKA PEMENUHAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KOTA PADANG

(Anisa Salsabila, 2210112087, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 120 Halaman, 2026)

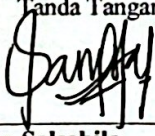
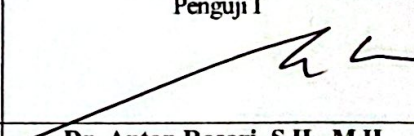
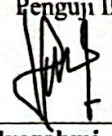
ABSTRAK

Rumah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) setiap masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebutuhan atas terpenuhinya tempat tinggal yang layak juga dituangkan melalui dasar konstitusi negara ini tepatnya pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaminan tersebut juga mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun permasalahan kesenjangan akses atas tempat tinggal yang layak masih menjadi persoalan penting untuk diatasi oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Termasuk bagi Kota Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat yang saat ini berada di peringkat satu sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana pemenuhan hak atas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia? Kedua, bagaimana pelaksanaan program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakharmonisan dalam regulasi hukum yang mengatur program rumah bersubsidi. Ketidakharmonisan antara regulasi tersebut berimplikasi pada proses pelaksanaan program rumah bersubsidi dalam praktik lapangannya yang berjalan dengan tidak optimal. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam proses koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan program rumah bersubsidi yang berimplikasi pada tumpang tindihnya tugas dan kewenangan antar instansi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rumah bersubsidi di Kota Padang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi serta penguatan implementasi agar pelaksanaan program rumah bersubsidi dapat berjalan sesuai dengan tujuan hadirnya program tersebut.

Kata Kunci : Rumah Bersubsidi, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemerintah

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 25 Februari 2026.

Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Anisa Salsabila	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H	Suci Delyarahmi, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fitriana, S.H., M.H.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



Alumni University Number	Anisa Salsabila	Alumni University Number
a. Place/Date of Birth : Solok /06 th June 2004	f. Graduation Date : 25 th February 2026	
b. Parent's Name : Indra Beni Yola Syofanita	g. Pass Predicate : Cumlaude	
c. Faculty : Law	h. Length of Study : 3 years 6 month	
d. Concentration : Administrative Law Resources	i. GPA : 3,97	
e. Student ID : 2210112087	j. Address : Kampai Tabu Karambia, Lubuk Sikarah, Kota Solok	

IMPLEMENTATION OF THE SUBSIDIZED HOUSING PROGRAM TO PROVIDE DECENT HOUSING FOR LOW-INCOME COMMUNITIES IN PADANG CITY

(Anisa Salsabila, 2210112087, Faculty of Law, Andalas University, 120 pages, 2026)

ABSTRACK

Housing is part of the Human Rights (HAM) of every Indonesian citizen that must be fulfilled by the state as part of its responsibility in running the wheels of government. The need for adequate housing is also stated in the basis of this country's constitution, specifically in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This guarantee also includes the provision of adequate housing for Low-Income Communities (MBR), but the problem of disparity in access to adequate housing is still an important issue to be addressed by the central government to the regional government. Including for Padang City as the capital of West Sumatra which is currently ranked first as the region with the highest poverty rate in West Sumatra. The formulation of the problem raised in this study is First, how is the fulfillment of the right to housing for low-income communities based on a positive legal perspective in Indonesia? Second, how is the implementation of the subsidized housing program for low-income communities in Padang City? The research method used is an empirical juridical approach by examining applicable laws and regulations and connecting them with factual conditions in the field. The results of this study indicate that there is still disharmony in the legal regulations governing the subsidized housing program. The lack of harmony between these regulations has implications for the implementation of the subsidized housing program in practice, which has not been optimal. Furthermore, there are still weaknesses in the coordination and synchronization process between Padang City government agencies in implementing the subsidized housing program, which has resulted in overlapping duties and authorities between these agencies. Therefore, it can be concluded that the implementation of the subsidized housing program in Padang City has not fully complied with statutory provisions. Therefore, strengthening regulations and strengthening implementation is needed so that the subsidized housing program can run in accordance with its objectives.

Keywords: Subsidized Housing, Low Income Communities, Government

This minor thesis has defended in front of the examiner team at , February 25th 2026.

Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II
Anisa Salsabila	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H	Suci Delyarahmi, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Administrative Law: **Hendria Fitrina, S.H., M.H.**

Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: